

**ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN MAHKAMAH
AGUNG DALAM MENGABULKAN PENINJAUAN
KEMBALI JAKSA PENUNTUT UMUM
(Studi Kasus Perkara Nomor : 12 PK/Pid.Sus/2009)**

TESIS

**Oleh :
MUHAMAD ISMAIL ADAM
201920251013**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
JAKARTA
2021**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : Analisis Yuridis Pertimbangan Mahkamah Agung
Dalam Mengabulkan Peninjauan Kembali Jaksa
Penuntut Umum (Studi Kasus Perkara Nomor :
12 PK/Pid.Sus/2019)

Nama Mahasiswa : Muhamad Ismail Adam

Nomor Pokok Mahasiswa : 201920251013

Program Studi/Fakultas : Magister Ilmu Hukum / Hukum

Program Konsentrasi : Hukum Pidana

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 21 Oktober 2021

Jakarta, 21 Oktober 2021

MENYETUJUI :

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. ERWIN OWAN HERMANSYAH, SH.,MH

SABELA GAYO, SH.,MH.,Ph.D

NIDN : 0319046403

NIDN : 0307078203

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Judul Tesis : Analisis Yuridis Pertimbangan Mahkamah Agung
Dalam Mengabulkan Peninjauan Kembali Jaksa
Penuntut Umum (Studi Kasus Perkara Nomor :
12 PK/Pid.Sus/2019)
Nama Mahasiswa : Muhamad Ismail Adam
Nomor Pokok Mahasiswa : 201920251013
Program Studi / Fakultas : Magister Ilmu Hukum / Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana
Tanggal Lulus Ujian : 21 Oktober 2021

Jakarta, 21 Oktober 2021

Mengesahkan,

Ketua Tim Penguji : **Dr. Hotma P. Sibuea, S.H.,M.H**
NIDN : 0323035802

Penguji I : **Dr. Yurnal, S.H.,M.H**
NIDN : 0314125804

Penguji II : **Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, S.H.,M.H**
NIDN : 0319046403

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum



Dr. Lusia Sulastri, S.H.,M.H
NIDN : 0127117401

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya



Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H.,M.M.,M.H
NIDN : 0312117102

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa,

Tesis yang berjudul **Analisis Yuridis Pertimbangan Mahkamah Agung Dalam Mengabulkan Peninjauan Kembali Jaksa Penuntut Umum (Studi Kasus Perkara Nomor : 12 PK/Pid.Sus/2019)** ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

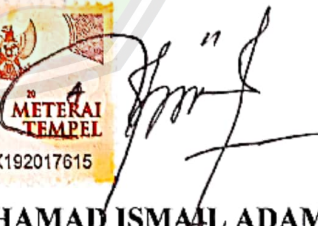
Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecenderungan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengizinkan tesis ini dipinjam dan digandakan melalui Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberikan izin kepada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan Tesis ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui Internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Jakarta, 21 Oktober 2021
Hormat Saya,




(MUHAMAD ISMAIL ADAM)
NPM : 2019 2025 1013

ABSTRAK

Muhamad Ismail Adam. 201920251013. Analisis Yuridis Pertimbangan Mahkamah Agung Dalam Mengabulkan Peninjauan Kembali Jaksa Penuntut Umum (Studi Kasus Perkara Nomor : 12 PK/Pid.Sus/2009).

Peninjauan kembali terhadap kebijakan hukum pidana (*ius constitutum*) adalah untuk mengatur para pihak yang dapat mengajukan peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam perkara pidana ialah terpidana atau ahli warisnya sebagaimana diatur dalam norma Pasal 263 ayat (1) KUHAP. Dalam kasus Joko Soegiarto Tjandra putusan nomor 12 PK/Pid.Sus/2009 tanggal 11 Juni 2009, dalam prakteknya Mahkamah Agung menerima dan mengakui Jaksa Penuntut Umum sebagai salah satu pihak yang dapat mengajukan peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam perkara pidana selain terpidana atau ahli warisnya.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisa tentang pertimbangan dan penerapan hukum pada hakim Mahkamah Agung. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan empiris dengan pendekatan kualitatif yaitu metode penelitian yang dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan dan kepustakaan hukum serta doktrin yang berkaitan dengan permohonan Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan peninjauan kembali tersebut diterima atau dikabulkan Mahkamah Agung.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, pertimbangan atas putusan Mahkamah Agung menimbulkan konflik kepentingan dan kekacauan hukum, menimbulkan persoalan struktur, kultur dan substansi hukum. Sebab makna rumusan ketentuan-ketentuan dalam KUHAP jelas dan telah normakan oleh Mahkamah Konstitusi khususnya Pasal 263 Ayat (1) KUHAP namun tidak implementasikan oleh Mahkamah Agung sehingga tidak ada kepastian hukum. Oleh karena itu mulai dari Pengadilan Negeri sampai pada Mahkamah Agung harus mengikuti Putusan Mahkamah Agung Nomor : 84 PK/Pid/2006 dan Putusan Nomor 16/PUU-VI/2008 tertanggal 15 Agustus 2008 sehingga perkara selanjutnya tidak saling bertentangan satu dengan yang lain.

Kata kunci : Peninjauan Kembali, Jaksa Penuntut Umum tidak memiliki legal standing.

ABSTRACT

Muhammad Ismail Adam. 201920251013. Juridical analysis of the Supreme Court Consideration when Granting Consent to Review of Court Decision by the Public Prosecutor (Case Study Number:12 /PK/Pid.Sus/2009).

Review on criminal legal policy (*ius constitutum*) is intended to administer all parties who may apply for review of court decisions which already have permanent legal power in criminal cases shall be the convict or the heirs as stipulated in the provision of Article 263 paragraph (1) of CRIMINAL CODE BOOK (KUHP). In the case of Joko Soegiarto Tjandra, court ruling number 12 PK/Pid.Sus/2009 dated June 11, 2009, the Supreme Court accepted and recognized Public Prosecutor as a party to apply for review of court decisions which already have permanent legal power in criminal cases, besides the convict or his heirs.

The purpose of this article is to identify, study and analyze the considerations and legal execution of the Supreme Court Judge. By way of normative and empirical legal research methods, through qualitative approach, namely research method on legal provisions and legal books as well as doctrine related to the application of the Public Prosecutor for the aforesaid review acceptable or approved by the Supreme Court,

Based on research by the writer, considerations on the Supreme Court decision have resulted conflict of interest and legal chaos, cause structural, cultural problems and legal substance. Because the formula significance of the provisions in the CRIMINAL CODE BOOK are clear and have been normalized by the Constitutional Court, particularly Article 263 Paragraph (1) of the CRIMINAL CODE BOOK and yet are not executed by the Supreme Court as to cause absence of legal certainty. Therefore, the District Court up to Supreme Court shall observe Decision of the Supreme Court Number : 84 PK/Pid/2006 and Decision Number 16/PUU-VI/2008 dated August 15, 2008, hence subsequent cases will not contradict to each other.

The key words : In Review of Court Decision, the Public Prosecutor possesses no legal standing.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur kehadiran Allah subhanahu wata'ala atas segala nikmat dan karunia Ridho-Nya, sehingga tesis yang berjudul “Analisis Yuridis Pertimbangan Mahkamah Agung Dalam Mengabulkan Peninjauan Kembali Jaksa Penuntut Umum (Studi Kasus Perkara Nomor : 12 PK/Pid.Sus/2009)” dapat diselesaikan. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) dalam bidang program studi Magister Ilmu Hukum pada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Inspektur Jenderal Polisi (P) Dr. H. Bambang Karsono, Drs. S.H.,M.M selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. H. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H.,M.H.,M.M. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, SH.,MH dan Sabela Gayo, SH.,MH.,Ph.D. selaku Dosen pembimbing dalam penulis menyelesaikan Tesis ini.
4. Seluruh Dosen dan Civitas pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Orangtua penulis Ibu Saijah dan Bapak Satro, Istri terkasih Sopiyaun dan kedua buah hati tercinta Aisyah Nabila Adam dan Ardhana Putra Adam Rambe.
6. Seluruh teman-teman angkatan ke 23 Program Studi Magister Hukum.
7. Kepada semua pihak yang telah membantu, yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis berharap tesis ini dapat memberi manfaat baik akademisi maupun praktisi hukum terutama Aparat Penegak Hukum. pada akhirnya, penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena diharapkan saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan tesis ini.

Jakarta, 21 Oktober 2021
Penulis

Muhamad Ismail Adam

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah.....	4
1.2.1. Identifikasi Masalah	4
1.2.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
1.3.1. Tujuan Penelitian.....	5
1.3.2. Manfaat Penelitian.....	5
1.4. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran.....	6
1.4.1. Kerangka Teoritis.....	6
1.4.2. Kerangka Konseptial	25
1.4.3. Kerangka Pemikiran	26
1.5. Metode Penelitian	27
1.6. Sistematika Penulisan	28
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	29
2.1. Pengertian, Latar Belakang Terbentuknya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).....	29
2.2. Pengertian Pertimbangan Hukum	37

2.3. Pengetian Peninjauan Kembali	37
2.4. Pengertian, Wewenang Jaksa dan Jaksa Penuntut Umum.....	43
2.5. Kewenangan Mahkamah Agung.....	53
2.6. Kekuatan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi	54
2.7. Konsepsi Implementasi	57
BAB III HASIL PENELITIAN	59
3.1. Kronologis	59
3.1.1. Melakukan Perbuatan-Perbuatan Melawan Hukum	60
3.1.2. Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri atau Orang Lain atau Suatu Badan	75
3.1.3. Secara Langsung Atau Tidak Langsung Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara Dengan Perbuatan	79
BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN	86
4.1. Pertimbangan Mahkamah Agung Mengabulkan Peninjauan Kembali Jaksa Penuntut Umum.....	86
4.2. Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-VI/2008.....	102
BAB V PENUTUP	105
5.1. Kesimpulan.....	105
5.2. Saran.....	105
DAFTAR PUSTAKA.....	107
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	112
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1. Transaksi SWAP dan Money Market Antara PT. Bank Bali dengan PT BDNI	70
Tabel 4.2. Pemindahan Dana Dari Rekening PT. Era Giat Prima	76
Tabel 4.3. Pemindahan Dana Dari Rekening Joko Soegiarto Tjandra	77

